

PARADIGMA BARU PROFESI AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh: Dr. Sri Trisnaningsih, SE., M.Si
(Ketua Program Studi Akuntansi UPNV Jatim)

Pendahuluan

Tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* baik di sektor publik maupun swasta kini semakin gencar, dan tuntutan ini memang sangat wajar. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi, ternyata disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta).

Merebaknya tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik), profesi akuntan banyak mendapat sorotan terutama terkait dengan peranan profesi akuntan yang selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan *good governance*. Peran profesi akuntan dalam hal ini harus lebih diberdayakan, baik secara internal (KAP) maupun eksternal (*stakeholders*) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan *good governance* tersebut. Pemberdayaan akuntan antara lain: pemahaman *good governance* yang lebih baik, tanggungjawab yang lebih besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan dalam membantu *stakeholder* namun tidak menyalahi etika profesi yang ada. Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu mengidentifikasi perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis kondisi tantangan masa depan yang lebih baik, sehingga opini yang dihasilkan akan sangat aktual. Aturan yang mengacu prinsip *good governance* tidak hanya akan mencegah skandal, tetapi bisa mendongkrak kinerja korporat.

Ketidakberdayaan Profesi Akuntan: Sebuah Realita

Munculnya pandangan skeptis terhadap peran profesi akuntan dalam mewujudkan *good governance* memang beralasan. Kenyataan menunjukkan banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* dari akuntan publik, justru setelah opini tersebut keluar perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Meskipun proses evolusi dan perbaikan terus dilakukan, namun berbagai komentar tentang ketidakmampuan standar dan

praktek akuntansi dalam mengakomodasi perubahan ekonomi yang berlangsung secara cepat masih terus berlanjut.

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya berbagai fenomena dan penilaian di atas, yaitu: Pertama, adanya *moral hazard* yang dilakukan oleh akuntan. Misalnya dalam kasus laporan keuangan bank publik, terdapat pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan manajemen bank yang disembunyikan atau tidak dijadikan pertimbangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan. Kedua, standar akuntansi dan standar auditing yang menjadi pedoman para akuntan dalam menjalankan profesinya memang tidak mampu menjangkau transaksi-transaksi tertentu, sehingga transaksi tersebut lolos dari pengamatan akuntan. Padahal, ditinjau dari aspek lain, transaksi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Meskipun faktor pertama, yaitu adanya *moral hazard* yang dilakukan oleh akuntan ikut mengurangi kualitas *output* profesi akuntan, dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada pembahasan faktor kedua, tentang standar akuntansi dan standar auditing yang menjadi pedoman para akuntan dalam menjalankan profesinya memang tidak mampu menjangkau transaksi-transaksi tertentu sehingga transaksi tersebut lolos dari pengamatan akuntan. Terdapat dua alasan yang melandasi pemikiran ini: Pertama, faktor *moral hazard* merupakan *uman eror factor* yang terkait dengan persoalan etika yang sulit diperbaiki melalui rekomendasi saran bila tidak disertai dengan *enforcement* dan *political will* yang kuat dari pelakunya untuk berubah. Kedua, paradigma profesi akuntan saat ini sebagaimana tercermin dari standar akuntansi dan standar auditing sudah tidak *up to date* lagi dalam menjawab atau menghadapi tantangan masa depan, bahkan tuntutan zaman yang sudah demikian kompleks. Dalam konteks inilah, maka diperkenalkan sebuah konsep auditing yang disebut dengan istilah "*corporate governance audit*".

Corporate Governance Audit: Mengapa Diperlukan?

Selama ini kita mengenal dua konsep utama auditing, yaitu: *financial audit* dan *operational audit*. Namun tentunya kita tidak bisa mengabaikan begitu saja konsep-konsep audit lainnya, seperti: audit forensik, audit lingkungan, audit investigasi, dan sebagainya.

Financial audit terkait dengan masalah kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Hasil akhirnya adalah berupa laporan keuangan

yang telah diberi opini. Sementara *operational audit*, terkait dengan efisiensi dan efektivitas organisasi. Hasil akhirnya biasanya berupa rekomendasi yang mengarah pada perbaikan kinerja perusahaan. Karena terkait dengan kinerja perusahaan, maka ukuran yang digunakan biasanya berupa tingkat profitabilitas yang dihasilkan manajemen.

Corporate governance audit (CGA) berbeda dengan kedua konsep audit utama di atas. CGA lebih mengarah pada audit atas kewajaran pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) yang dilakukan oleh manajemen. Melalui CGA ini, maka arah, prospek, dan risiko (*risk*) akibat kebijakan yang diambil manajemen perusahaan bisa dapat diprediksi. Dengan demikian, bagi para pemodal hasil audit tersebut akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam setiap aktivitas investasi mereka.

CGA ini memang identik dengan audit atas transaksi *non* keuangan (*non financial audit*). Perbedaannya adalah, jika orientasi audit atas transaksi *non* keuangan terletak pada masalah teknis pengelolaan, namun pada CGA ini penekanannya terletak pada kewajaran transaksi dan kebijakan (*policy*). Mengapa CGA diperlukan? Beberapa alasan yang mendasari perlunya CGA :

Pertama, munculnya tuntutan yang semakin besar dari masyarakat, terutama para investor akan informasi yang komprehensif, tidak hanya informasi yang terkait dengan data-data keuangan perusahaan tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Riset yang telah dilakukan oleh Shelly Taylor & Associate, menunjukkan bahwa 44% dari mayoritas investor institusional tertarik dan sangat berkepentingan atas informasi kebijakan perusahaan. Padahal, dua tahun sebelumnya minat atas informasi tersebut hanya 5%. Ternyata, informasi-informasi yang telah memunculkan terjadinya berbagai isu, seperti: posisi pasar, kecenderungan bisnis/industri, dan kualitas produk sangat dimiliki oleh manajer-manajer investasi di Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa misalnya, ketiga informasi tersebut mendapat skor 76%, sedangkan di Amerika Serikat 61%, atau naik dari masing-masing 30% dan 39% pada dua tahun sebelumnya.

Kedua, perkembangan profesi akuntan sejalan dengan perkembangan pasar modal. Transparansi merupakan persyaratan mutlak yang harus ada bagi eksistensi pasar modal. Dengan demikian, tersedianya informasi yang lengkap tentang perusahaan emiten merupakan keharusan untuk menjamin tidak terjadinya bias investasi di pasar modal. Sementara itu, kepentingan investor dalam aktivitas investasinya seperti yang didefinisikan oleh Louis Loweinsten

adalah perusahaan dalam periode cukup panjang mampu menghasilkan *cash flow* lebih besar dari *immediate capital needs*, sehingga tersedia peluang untuk melakukan inovasi dan ekspansi. Dengan demikian, kepentingan investor tidak sekedar *current earning* tetapi juga ingin mengetahui *stability of earnings*, potensi dan prospek perusahaan ke depan, *special identity*, seperti: *unique product*, *brand name*, *geographical advantages*, dan lain-lain. Di sinilah terjadi *information gap*, antara yang dibutuhkan oleh investor dengan yang mampu disediakan oleh laporan keuangan. Informasi laporan keuangan hanya berisikan indikator-indikator keuangan historis. Bisa jadi, dalam beberapa tahun laporan keuangan historis tersebut, perusahaan memiliki kinerja yang bagus (misalnya: *cash flow* nya tinggi). Namun, karena kebijakan tertentu dari manajemen yang tidak tampak pada laporan keuangan dan efeknya baru muncul dalam waktu agak lama (misalnya, lima tahun), bisa jadi perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: kebijakan ekspansi yang berakibat semakin menjauhkan bisnis perusahaan dari bisnis inti (seperti kasus PT. Barito Pacific Timber), perubahan bisnis inti (kasus PT. Asuransi Lippo Life dari perusahaan asuransi menjadi perusahaan yang bergerak di bidang *cyber internet* dan *e-commerce*), dan lain-lain.

Ketiga, keputusan investasi kadangkala tidak didasarkan atas informasi akuntansi. Kompilasi atas berbagai studi empiris atas penggunaan informasi akuntansi dalam mekanisme pasar modal di Amerika Serikat, seperti diungkap oleh Lev, menunjukkan bahwa korelasi antara informasi akuntansi yang di-*release* dalam laporan keuangan dan pergerakan saham hanya berkisar dari 0,03 sampai 0,15. Studi lain yang dilakukan oleh Previts, mengungkapkan bahwa informasi yang dipergunakan oleh para analis di pasar modal, sebagian besar bukan bersumber dari informasi keuangan. Pengamatan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menggambarkan hal yang relatif serupa. Pergerakan indeks harga saham gabungan di BEI tidak berkaitan dengan perubahan fundamental ekonomi perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan.

Transparansi perusahaan melalui publikasi laporan keuangan memang penting, namun belum cukup menjadi dasar bagi pengambilan keputusan investasi, karena: (a) laporan keuangan adalah *historical report*, sementara investor membutuhkan bola kristal yang mampu memberi petunjuk tentang prospek perusahaan, paling tidak pada tingkat probabilitas. Sementara itu, prospek perusahaan sangat ditentukan oleh kebijakan manajemen yang

berpengaruh bagi tantangan masa depan perusahaan. (b) laporan keuangan memerlukan analisa-analisa lebih jauh sebelum berguna bagi pengambilan keputusan investasi. Padahal, aktivitas analisis tersebut memerlukan waktu yang lama. Sementara keputusan investasi di pasar modal harus diambil dalam waktu singkat.

Keempat, *financial audit* hanya berurusan dengan kewajaran laporan keuangan dan bukan kewajaran transaksi. Sedangkan di sisi lain, laporan keuangan tidak lebih dari sebuah *general purpose report* yang syarat dengan pilihan teknik dan kompromi penyajian. Dalam sudut pandang akuntansi bisa dibenarkan, meskipun perubahan metode penyajian tersebut harus dijelaskan. Namun dari sudut pengelolaan perusahaan, tentu harus diteliti apakah wajar perubahan metode penyajian tersebut? Adakah tujuan-tujuan tertentu dibalik keputusan untuk mengubah metode penyajian tersebut? Misalnya, tujuan untuk menutupi keburukan perusahaan. Di sinilah, CGA diperlukan untuk meneliti ada atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut.

Kelima, hasil rekomendasi dari *operational audit* lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat teknis operasional perusahaan. Misalnya, rekomendasi terhadap sistem dan prosedur kerja, biaya operasional, dan kinerja manajemen perusahaan. Tolak ukurnya adalah sejauh mana operasional perusahaan mampu men-*generated income* sebesar-besarnya. Dengan demikian, jika rasio *income* dibandingkan dengan *output* dapat diperkecil, atau rasio *output* dibandingkan dengan *input* semakin tinggi, maka ini berarti bahwa pengelolaan operasional perusahaan telah berjalan dengan benar.

Kelemahan audit operasional adalah mengabaikan aspek-aspek di luar kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, bagaimana cara perusahaan memperoleh keuntungan/laba? Apakah diperoleh melalui monopoli atau secara kompetisi? Jika diperoleh secara monopoli, apakah monopoli tersebut terjadi karena proses alamiah (kompetisi) atau “hadiah” dari pemerintah (karena faktor kedekatan dengan kekuasaan)? Meskipun audit operasional merekomendasikan perbaikan manajemen, namun umumnya rekomendasi tersebut hanya menyentuh pada aspek teknis operasional, dan tolok ukurnya adalah *profit*. Padahal, dalam konteks *good governance*, efektivitas manajemen tidak hanya diukur pada kemampuannya men-*generated income*, tetapi juga ditentukan oleh sejauh mana kontrol pemilik (*owner*) dapat diminimalisir. Dalam sebuah perusahaan, jika kepemilikannya dipegang oleh mayoritas tunggal, biasanya kontrol pemilik terhadap manajemen perusahaan akan sangat kuat. Akibatnya,

kepentingan pemilik minoritas seringkali dikorbankan pihak manajemen untuk memuaskan kepentingan mayoritas pemilik.

Kesimpulan

Profesi akuntan banyak mendapat sorotan terutama terkait dengan peranan profesi akuntan yang selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan *good governance*. Peran profesi akuntan dalam menghadapi tantangan masa depan, hal ini harus lebih diberdayakan baik secara internal (KAP) maupun eksternal (*stakeholders*) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan *good governance*. Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu mengidentifikasi perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis kondisi tantangan masa depan yang lebih baik, sehingga opini yang dihasilkan akan sangat aktual. Munculnya pandangan skeptis terhadap peran profesi akuntan dalam mewujudkan *good governance* memang beralasan. Kenyataan menunjukkan banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat *unqualified opinion* dari akuntan publik, justru setelah opini tersebut keluar perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan.

Corporate governance audit (CGA) berbeda dengan kedua konsep audit utama, yaitu: *financial audit* dan *operational audit*. Namun tentunya kita tidak bisa mengabaikan begitu saja konsep-konsep audit lainnya, seperti: audit forensik, audit lingkungan, audit investigasi, dan sebagainya. CGA lebih mengarah pada audit atas kewajaran pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) yang dilakukan oleh manajemen. Melalui CGA ini, maka arah, prospek, dan risiko (*risk*) akibat kebijakan yang diambil manajemen perusahaan bisa diprediksi. Bagi para investor, hasil audit tersebut akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam setiap aktivitas investasi mereka.